

Menghadirkan agama

Menghadirkan agama --apalagi hanya satu tafsir tertentu dalam agama-- ke dalam dunia film, sungguh sangat musykil. Di antara dua entitas ini, agama dan film, terdapat jurang pemisah yang amat dalam. Agama sebagaimana dikemukakan di dalam fikih Islam memiliki perhatian yang rendah terdapat dunia perfilman ini, karena di dalamnya selalu dimungkinkan terjadinya sejumlah kemaksiatan. Agama mengatur secara amat ketat menyangkut hubungan laki dan perempuan yang bukan mahram. Tidak boleh ada persentuhan fisik. Sementara film meniscayakan adanya perjumpaan dan persentuhan fisik. Jika film menuntut keseriusan dan totalitas dalam berakting, maka agama melalui fikih Islam justru hadir untuk membatasi totalitas itu.

Sebagai misal, adegan ciuman yang dilakukan orang yang bukan mahram dan berbeda jenis kelamin, baik karena tuntutan naskah film maupun karena telah menjadi kelaziman sosial, jika ditanyakan pada agama, maka tidak banyak yang dikatakan oleh agama, kecuali bahwa itu merupakan kawasan terlarang. Agama hanya datang dengan khotbah yang standar, tindakan itu merupakan perkara haram yang harus dihindari. Islam termasuk dalam deretan agama yang amat restriktif dalam perkara yang satu itu. Ciuman yang dilakukan oleh orang yang bukan mahram dan berbeda jenis kelamin, baik dilakukan dengan nafsu maupun tidak, dalam pandangan agama adalah memiliki derajat keharaman yang sama.

Ini, jika melulu berpatokan kepada Islam. Namun, bukankah masyarakat Indonesia hidup dengan keragaman patokan dan parameter. Keanekaragaman agama, budaya, dan etnis, kiranya akan membentuk penilaian yang berbeda menyangkut satu pokok soal seperti adegan-adegan di dalam film itu. Oleh karenanya, pada hemat saya, Islam harus diletakkan sebagai salah satu anasir saja dari keseluruhan norma yang hidup di tengah masyarakat. Islam tidak bisa dijadikan sebagai parameter tunggal untuk menilai sebuah karya film. Islam harus didudukkan secara setara dengan norma-norma lain. Islam mesti bertanding dan berkontestasi dengan norma-norma lain.

Sebab, dalam masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia, larangan terhadap ketidaksopanan hanya bisa dilakukan sejauh melalui mekanisme yang demokratis, bukan semata-mata hasil pemaksaan dari satu kelompok agama atau segmen masyarakat tertentu saja. Tidak ada hegemoni dari satu komunitas atas komunitas yang lain. Setiap orang memiliki status yang setara di dalam berdiskusi menyangkut batas kesopanan itu. Diskusi adalah ruang untuk melakukan negosiasi dan tawar-menawar mengenai perkara bermoral-tidak bermoral tersebut. Dari diskusi inilah diharapkan dapat dilahirkan sebuah kesepakatan dalam wujud regulasi mengenai pornografi dan bukan pornografi, pornoaksi dan bukan pornoaksi.

Regulasi pornografi

Sungguh, adegan ciuman di dalam film *Buruan Cium Gue!* tidaklah seberapa sekiranya diukur dari arus pornografi, pornoaksi, yang berlangsung secara gegantis di luar gedung bioskop. Betapa ruas-ruas jalan di kota-kota besar seperti Jakarta kini terus dihiasi